



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Udayana Nomor 11 Telp/Fax (0370) 642965, 642966, 645828 Mataram

Website: www.dprd-ntbprov.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 15/KEP.DPRD/2021

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Perda merupakan instrumen perencanaan Program Pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 merupakan hasil sinkronisasi dan harmonisasi usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan usul Prakarsa Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa hasil penyusunan Program Pembentukan Perda antara Pemerintah Daerah dan DPRD disepakati menjadi Program Pembentukan Perda dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Memperhatikan :
1. Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 25 November 2021;
 2. Persetujuan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 25 November 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana Diktum KESATU terdiri dari:
- a. 16 (Enam Belas) buah Rancangan Peraturan Daerah usul Prakarsa Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - b. 14 (Empat Belas) buah Rancangan Peraturan Daerah usul Prakarsa Gubernur Nusa Tenggara Barat
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 November 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

K E T U A,

HJ. BAIQ ISVIE RUPAEDA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Mataram;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB di Mataram;
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 15/KEP.DPRD/ 2021

TANGGAL : 25 NOVEMBER 2021

DAFTAR 16 (ENAM BELAS) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL PRAKARSA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022

NO.	JUDUL RAPERDA	PEMERAKARSA	KET.
1	2	3	4
1.	Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam	Bapemperda	Luncuran
2.	Raperda tentang Perlindungan Mata Air	Bapemperda	Luncuran
3.	Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Produk Lokal	Bapemperda	Luncuran
4.	Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Bapemperda	Luncuran
5.	Raperda tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psiktropika, dan Zat Adiktif Lainnya	Bapemperda	Luncuran
6.	Raperda tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah	Bapemperda	Luncuran
7.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Kecil	Bapemperda	Baru
8.	Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bapemperda	Baru
9.	Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Bapemperda	Baru
10.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika	Bapemperda	Baru
11.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi	Bapemperda	Baru
12.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika	Bapemperda	Baru

NO.	JUDUL RAPERDA	PEMERAKARSA	KET.
1	2	3	4
13.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Tipe B	Bapemperda	Baru
14.	Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	Bapemperda	Baru
15.	Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan	Bapemperda	Baru
16.	Raperda tentang Percepatan Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan	Komisi IV	Baru

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

K E T U A,



HU. BAIQ ISVIE RUPAEDA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 15/KEP.DPRD/ 2021

TANGGAL : 25 NOVEMBER 2021

DAFTAR 14 (EMPAT BELAS) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL PRAKARSA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022

NO.	JUDUL RAPERDA	KET.
1	2	3
1.	Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB	Luncuran
2.	Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Luncuran
3.	Raperda tentang Pencegahan dan Pengendalian Pemasukan Hewan Menular Rabies	Luncuran
4.	Raperda tentang Pengelolaan Gabah dan Jagung	Luncuran
5.	Raperda tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Usulan Baru
6.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal	Usulan Baru
7.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah	Usulan Baru
8.	Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah	Usulan Baru
9.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Usulan Baru
10.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037	Usulan Baru
11.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah	Usulan Baru
12.	Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan	Usulan Baru

NO.	JUDUL RAPERDA	KET.
1	2	3
13.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Usulan Baru
14.	Raperda tentang Pengadaan Beras Lokal Dalam Rangka Bela dan Beli Produk Lokal Serta Stabilisasi Harga Bahan Pokok Strategis	Usulan Baru

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

K E T U A,



HJ. BAIQ ISVIE RUPAEDA